



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN SUPRIJANTO
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
3. NHK : 417986

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 12.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/147 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.050.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/82 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m²/36 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m²/33 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 450.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m²/120 m² di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 542 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 267.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT GLS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU ZENIA XL 1300 CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HADIAH Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 337.250.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.837.084.732
F. HARTA LAINNYA	Rp.	324.650.284
Sub Total	Rp.	21.715.985.016
III. HUTANG	Rp.	6.000.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.715.985.016

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.